



Systematic Literatur Review : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nawang Wulan Cahya Ningrum¹, Putri Silviana², Dien Noviany Rahmatika³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Email : nawangwulancahyaningrum21@gmail.com¹, putrisilviana864@gmail.com²,
diennovi@upstegal.ac.id³

Abstract *This study aims to investigate how the financial achievements of Indonesian regional authorities are influenced by capital expenditure and PAD. The study employs the Systematic Literature Review (SLR) methodology. This method is used to ascertain, research, assess, and interpret any surviving studies relating to interesting phenomena using specific relevant research problems. SLRs can be used to find journals and conduct thorough reviews, each procedure adhering to standards or guidelines. In this study, 50 journals were used as references. The study's findings indicate Research findings prove that pure regional revenues provide important benefits regarding regional financial performance. This demonstrates how raising local real income can improve local governments' financial performance in satisfying development and community demands. On the other side, capital spending also significantly improves local governments' financial performance. This means that a rise in capital spending can strengthen the regional development structure and increase the competitiveness of the local economy. This research provides policy implications that "municipal authorities must focus on" pay attention to the diversification of local original income and increase fund distribution for capital investments to support economic growth and community welfare. In addition, this research also indicates the significance of effective and transparent financial management to achieve regional development goals in a sustainable manner.*

Keywords: *Localized Original Income and Investment, Financial Performance.*

Abstrak Pengkajian ini bermaksud demi menyelidiki seperti apa pencapaian keuangan otoritas Kawasan Indonesia dipengaruhi oleh pengeluaran modal dan PAD. Riset ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini dipergunakan guna memastikan, meneliti, menilai, serta mengartikan setiap studi yang masih ada yang berkaitan dengan fenomena menarik dengan menggunakan masalah penelitian tertentu yang relevan. SLR dapat digunakan untuk menemukan jurnal dan melakukan tinjauan menyeluruh, setiap prosedur mematuhi standar atau pedoman. Didalam penelitian ini menggunakan 50 jurnal sebagai referensi. Temuan riset membuktikan bila penerimaan murni wilayah memberi manfaat penting mengenai kinerja finansial daerah. Aspek ini mengindikasikan sebab kenaikan pemasukan PAD bisa memajukan kegiatan keuangan lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah. Di sisi lain, pengeluaran modal juga mempunyai dampak positif Hal ini sangat penting untuk bagaimana keuangan pemerintah daerah berjalan. Artinya, peningkatan pengeluaran anggaran dapat memperkuat struktur pembangunan daerah dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan diversifikasi pendapatan yang diperoleh daerah serta meningkatkan anggaran pengeluaran untuk belanja modal guna mendorong kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, analisis ini juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: PAD, Pengeluaran Dana, Kinerja Keuangan.

PENDAHULUAN

Di pertengahan perkembangan ekonomi era reformasi tahun 1998, muncul tuntutan pembentukan otonomi daerah yang lebih komprehensif, sejati, dan akuntabel. Menanggapi tuntutan tersebut, disahkanlah Undang-Undang otoritas local UU No. 32/2004 dan hukum Perdagangan yang tidak seimbang antara Bank Sentral dan Negara sehingga memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal inilah yang memunculkan apa yang disebut dengan proses transisi otonomi daerah, yaitu peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi (Yanto dan Astuti, 2020).

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juli 27, 2024; Published: Agustus 31, 2024

Nawang Wulan Cahya Ningrum nawangwulancahyaningrum21@gmail.com

Dekonsentrasi pemerintahan telah berakhir, dan desentralisasi atau juga disebut sebagai otonomi daerah telah menggantikan peran tersebut. Setiap daerah diberi otonomi yang cukup besar untuk menjalankan rumah tangga mereka sendiri dengan intervensi minimal dari pemerintah federal, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 32/2004 yaitu memberikan otonom yang signifikan bagi otoritas. Dikatakan kepada distrik demi meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan promosi partisipasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dimaksudkan guna mengembangkan kemakmuran juga fasilitasi publik, meningkatkan kedaulatan rakyat, menegakkan keseimbangan serta kesetaraan, dan mempertahankan korelasi baik antar daerah (Bilqis dan Priyono, 2023).

Otonomi daerah yaitu ketika sebuah daerah memiliki kebebasan untuk menetapkan peraturan, berkumpul, berorganisasi, dan melaksanakan kebijakan, serta mengatur keuangannya sendiri (Sari dan Mustanda, 2019). Pemerintah pusat tidak dapat mengawasi kemajuan daerah secara mandiri, itulah sebabnya kebijakan otonomi daerah diterapkan. Pemerintah daerah memiliki autonomi, yang berarti mereka dapat secara mandiri membuat peraturan, membuat dan menerapkan kebijakan, dan memantau keuangan mereka sendiri. Ini biasanya berarti bahwa pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memahami dan memenuhi kebutuhannya. Kawasan diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensinya dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah (Antari & Sedana, 2018).

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu jenis dana wilayah yang diteliti. PAD dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat untuk mengurangi pinjaman perusahaan serta mendorong pertumbuhan wilayah. Keterkaitan mengenai modal publik. Seberapa besar atau kecil pemerintahan suatu daerah akan menentukan seberapa baik ia dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pelaksanaan berbagai tugas operasional masyarakat akan lebih mudah dengan pemerintah daerah yang berskala besar. Semakin banyak pemerintah daerah, semakin sedikit kapasitas daerah yang mendapatkan hasil pendapatan. Namun, kegiatan dana daerah masih dapat dioptimalkan (Mahadewi dan Indraswarawai, 2023). Menurut Rafika Aulia dan Rahmawaty (2020) kemajuan yang dicapai oleh suatu daerah adalah hasil berdasarkan potensi daerah untuk mengendalikan *financial* dengan sukses. Rencana pendapatan dan pengeluaran daerah menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mengelola dana keuangannya. Ini mencakup kapasitas mereka untuk mendanai pembangunan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menyediakan layanan sosial kepada warganya.

Selama dua tahun terakhir, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh telah menurun. Ini turun dari 18,71 triliun rupiah pada 2019. Ini terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi penghematan biaya. Belanja modal melibatkan biaya

langsung dan tidak langsung, yang merupakan masalahnya. Realisasi total 9,23 triliun terdiri dari 605.956 miliar belanja karyawan, 4,51 triliun membeli benda dan layanan, dan 3,16 triliun investasi. Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menyebabkan mode belanja menurunkan plafon (Pemerintah Provinsi Aceh, 2020). Selain itu, ada hubungannya dengan masalah dana perimbangan provinsi Aceh, yang totalnya sebesar Rp4,23 triliun pada 2019 tetapi hanya digunakan Rp4,28 triliun. Surplus disebabkan oleh perubahan dana alokasi umum yang berkaitan dengan pembiayaan pendapatan tahun anggaran 2019 pemerintah Aceh. Di Aceh, PAD sebesar Rp 2,5 triliun digunakan secara bersamaan untuk proyek pembangunan tahunan senilai 4,6 hingga 9,1 triliun. Anggaran yang diberikan tidak cukup untuk mempercepat kemajuan Aceh. Ini karena Aceh terus membutuhkan dana besar untuk program seperti beasiswa, kelanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), program utama Aceh serta perluasan jaringan jalan rencana prioritas Kabupaten (Safrina, 2021).

KAJIAN LITERATUR

Definisi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Lathifa dan Haryanto (2019) ada sumber daya keuangan daerah terdiri dari dua kategori. Pertama, undang-undang menetapkan PAD, pembiayaan bagi hasil, dan pendapatan asli daerah lainnya sebagai bahan finansial otonom. Kedua, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melakukan inisiatif tertentu yang akan menghasilkan hasil setelah beberapa tahun. Pengembangan area fasilitas umum yang dapat menghasilkan infrastruktur adalah salah satu rencana. Karena belanja modal termasuk dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, maka kalimat tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran modal berlangsung yang memungkinkan daerah menghasilkan pendapatan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengklasifikasikan aset tetap dan belanja modal baru. Pengeluaran di masa depan diperkirakan akan menguntungkan mengambil pengeluaran pemeliharaan selama berbagai periode akuntansi dan peranannya dalam memperpanjang masa pakai, kapabilitas standar aset. Pengeluaran otonom, menurut regulasi Mendagri UU No. 13 Tahun 2006 mengenai penatausahaan keuangan daerah, didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membeli, membangun, atau membeli aktiva tetap berwujud yang memiliki masa umur melebihi setahun juga dapat dilaksanakan saat pelaksanaan pemerintahan. Lahan, mesin, alat, konstruksi, struktur jalan, *irrigation*, jaringan, serta aset lainnya dapat termasuk pada kategori aktiva tersebut. Pengembangan, pengadaan, atau akuisisi hanya boleh memasukkan biaya pembangunan atau pembelian aset tetap fisik. Hasilnya adalah memiliki

aset tetap yang dimiliki, yang merupakan kondisi yang diperlukan, dan belanja modal diperlukan. Tugas utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Pihak berwenang anggaran Belanja Modal APBD adalah alat keuangan yang digunakan oleh daerah untuk meningkatkan aset tetapnya. Anggaran ini didasarkan pada kebutuhan infrastruktur dan fasilitas daerah, yang membantu menjalankan tugas pemerintahan dan fasilitas umum dengan lebih efisien. Pemerintah daerah sering membeli aset tetap setiap tahun untuk tujuan anggaran dan layanan publik, yang berdampak keuangan jangka panjang (Prastiwi dan Aji, 2020). Akan tetapi belanja modal yang dianggarkan setiap tahun menunjukkan investasi pemerintah daerah pada APBD. Jika peningkatan pendapatan APBD suatu provinsi di kota dan kabupatennya tidak diimbangi dengan peningkatan uang investasi, infrastruktur, dan fasilitas fisik yang tidak memadai akan mempengaruhi kota dan kabupaten yang sedang berkembang, menurunkan potensi ekonomi (Arini dan Kusuma, 2019).

Pendapatan Asli Daerah adalah pembiayaan untuk wilayah, komponen utama demi mencapai upaya kemandirian daerah itu dipakai sebagai pemasok dana perkembangan wilayah serta operasional pemerintah berdasarkan potensi daerah. Sumber pendapatan yang stabil bagi negara untuk memenuhi kewajiban pembangunan dan pemerintahan. Daerah yang menggunakan APBD dengan efisien mendapat manfaat dari PAD yang efisien. (Pangestu, 2023). Besarnya pendapatan yang diterima daerah yang bersangkutan sebagai Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa baik daerah tersebut mampu mengelola keuangannya. Satu komponen dari pendekatan untuk mengevaluasi seberapa bergantung pada lingkungan terhadap pemerintah federal ialah melihat nilai PAD. Ketergantungan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat menurun seiring dengan meningkatnya nilai kontribusi PAD terhadap APBD (Bella, Sari dan Aswin 2022).

Penyediaan berdasarkan "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah" Mendagri Nomor 13/2006, dipengaruhi oleh pajak, retribusi, dan administrasi kekayaan wilayah. Hasil ini termasuk porsi keuntungan dari hasil modal pada BUMD, BUMN, dan juga usaha swasta atau UMKM.

Selain itu, ada bentuk-bentuk PAD tambahan yang dihasilkan asal sumber lainnya dapat diterima yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan wilayah bukan termasuk dalam retribusi daerah, keuntungan dari pengelolaan aset daerah dibagi menurut objek penghasilan, dan pajak daerah (Latri, Fatma dan Hardiansyah, 2021). PAD Kekayaan khas, pendapatan asli, Bea dan pungutan wilayah adalah penerimaan asli daerah lainnya yang dapat diterima. Ini merupakan sumber penghasilan daerah bahwa sangat penting untuk mencukupi pengeluaran, terutama pada belanja modal (Prawiroyudo dan Suhendro, 2023).

Belanja Modal

Capital expenditure adalah beban anggaran dibayar dengan membeli aset tetap dan aset lainnya mampu menghasilkan keuntungan sepanjang periode pelaporan. Pengeluaran anggaran dialokasikan berdasarkan keperluan otonomi akan fasilitas yang diperlukan bagi operasi pemerintahan dan proyek pekerjaan umum (Handayani dan Erinosa, 2020). Belanja modal dapat membantu masyarakat dengan membangun infrastruktur, membeli mesin, dan memperoleh lebih banyak aset tetap. Salah satunya adalah biaya modal yang dimasukkan ke dalam anggaran belanja langsung pemerintah dan menyebabkan pemerintah memiliki lebih banyak aktiva tetap. Keputusan belanja modal dibuat oleh otonomi wilayah berdasarkan infrastruktur dan instrumen yang diperlukan guna mengoperasikan fasilitas umum dan menyelesaikan tugas resmi dengan cepat (Aulia Devi dan Tjahjono, 2023).

Menurut PP 71/2010, "Belanja modal yaitu pengeluaran otonomi daerah dengan keuntungannya lebih dari satu periode anggaran dan menjadi penambah aset daerah, kemudian dapat menyebabkan biaya teratur misalnya dana perawatan meningkat pada jenis-jenis belanja tata kelola" (Niswani dan Firdaus, 2022). Pengeluaran dana dipakai guna membeli aktiva tetap regional, Gedung dan peralatan. Metode untuk memperoleh belanja modal adalah dengan membeli aktiva tetap yang masih dalam kepemilikan pemerintah kota sebagai hasil dari belanja modal. Ini adalah komponen terutama dalam menyediakan layanan publik. Setiap periode, pemerintah kabupaten menyisihkan dana rencana belanja daerah guna membeli aktiva tetap yang sesuai tujuan, pengeluaran, dan layanan publik yang memiliki dampak keuangan jangka panjang untuk meningkatkan jumlah aset yang tersisa (Hardi, 2019).

Capital expenditure merupakan biaya aset, seperti membeli produk akan bertahan lama juga dapat terpakai dalam jangka waktu lama. Pada hal otoritas, misalnya, mendirikan sekolah baru, membeli software, membangun jalan raya, dan *hospital*, dan sebagainya. Belanja modal, yang dapat bertahan selama beberapa dekade, dapat menghasilkan pengelolaan ekonomi yang lebih hemat. Belanja modal terdiri oleh inisiatif kecil dan rencana satu tahun. Meskipun demikian, proyek yang lebih kompleks membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan (Marlina, 2019)

Berdasarkan Undang-Undang No. 71/2010 tentang *standard accounting*, mengatakan belanja modal adalah total uang yang dibelanjakan untuk operasi tetap dan operasi menguntungkan lainnya selama beberapa waktu akuntansi. Kekayaan negara yang dapat

digunakan, meliputi aset tambahan, bernilai setara dengan aset lainnya dan berumur lebih lama dari setahun. Yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, belanja dikenal sebagai belanja daerah. Kegiatan anggaran melibatkan pemerintah federal dan daerah. Belanja pemerintah daerah digambarkan sebagai penurunan nilai aktiva bersih pada tahun anggaran yang berlaku. Melalui pembiayaan daerah, pemerintah federal menunjukkan komitmennya terhadap distrik wilayah melalui penyediaan wewenang untuk memantau serta mengawasi operasi otoritas wilayah serta kepentingan komunitas sekitar investasi yang dilakukan pemerintah daerah sangat baik karena adalah tanggung jawab regional selama satu tahun yang bukan kewajiban menerima kompensasi dari daerah. Tujuan belanja daerah adalah untuk memperbaiki daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat laba wilayah yang dapat diperoleh bertambah, kemampuan mereka demi membiayai pembelian daerah bisa meningkat (Aulia Devi dan Tjahjono, 2023).

Kinerja Keuangan

Menurut Berti Indah Sari dan Halmawati (2023) kinerja didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program kebijakan untuk memenuhi tujuan, tujuan, dan visi pemerintah otoritas. Efisiensi fiskal daerah ialah yemuan studi kuantitatif tentang kontribusi program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Evaluasi kinerja fiskal oleh pemerintah daerah beroperasi sebagai sumber informasi mengevaluasi juga memutuskan strategi untuk meningkatkan standar sektor publik.

Suatu organisasi dapat menilai kinerjanya dengan menganalisis rasio keuangan. Namun, pemerintahan kota belum sering menggunakan analisis rasio. Bahwa saat ini tidak ada kejelasan arah karena hanya sedikit pihak yang mengevaluasi kesuksesan keuangan daerah dengan menggunakan *financial analysis ratio* pada sektor publik (pemerintah), khususnya APBD. Untuk menjaga keterbukaan, integritas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, analisis rasio masih diperlukan (Darmastuti, 2022).

Ada keyakinan bahwa peraturan keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik juga. Kinerja fiskal daerah yang kuat menunjukkan bahwa daerah itu kuat secara keseluruhan. Kinerja finansial suatu daerah adalah tolak ukur daya pemerintah dalam mengelola otonomi daerah. Ada banyak cara untuk mengevaluasi kinerja keuangan. Untuk menghitung kinerja keuangan dapat menggunakan sumber informasi finansial seperti *bugjet* pemasukan serta pengeluaran wilayah. Meningkatkan prestasi otoritas daerah, meningkatkan kelembagaan dan komunikasi, meningkatkan

akuntabilitas publik dapat membantu pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya adalah tiga tujuan dari pengukuran kondisi keuangan daerah pemerintah (Yulinchton, 2022).

Pemerintah kota telah melakukan tindakan yang diakui secara finansial untuk mengevaluasi seberapa efektif mereka menghasilkan pendapatan dan menggunakan sumber daya mereka untuk mencari peluang untuk berkembang dan berkembang. Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan dan kinerja pemerintah. Laporan keuangan yang kuat harus menunjukkan bahwa rangkuman pelaporan memperoleh informasi yang akurat dan bermakna mengenai kinerja keuangan pemerintah dalam penyajian keuangannya (Febrianti dan Putra, 2023).

METODE PENELITIAN

Penulis memakai pendekatan SLR (*Systematic Literature Review*), yang berarti mengkritik serta menilai riset sebelumnya secara sistematis dengan menerapkan standar yang berlaku. Metode ini digunakan untuk memeriksa hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal yang berfokus pada bidang studi tertentu. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan tanpa perlu melakukan pengumpulan secara langsung di tempat kejadian. Dengan menggunakan Google untuk melakukan pencarian data dengan Kata kunci menjadi fokus utama seperti "pemasukan daerah, investasi infrastruktur, evaluasi keuangan.", diperoleh 1.000 artikel yang relevan. Selain itu, menulis 573 artikel tentang berbagai tema terkait. Kami membatasi tahun penerbitan jurnal menjadi 2018–2024 karena jumlah ini tidak mencukupi, dan kami menemukan 139 artikel. Pada akhirnya, kami mengumpulkan 53 publikasi dari berbagai jurnal global, termasuk Google Scholar, Publish of Perish, dan Semantic Scholar, setelah mengekstrak beberapa artikel sampel yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal-jurnal terdahulu yang dipilih dan dibaca dengan cermat oleh penulis dan dikategorikan sesuai dengan relevansi istilah utamanya, "*revenue local*", "pengeluaran untuk asset tetap", serta "efisiensi keuanan". Tabel matriks dibuat sebagai hasil dari proses penelitian ini oleh penulis untuk memudahkan dalam mengkategorikan sesuai kata kunci, seperti tabel dibawah ini:

Table 1

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

No	JURNAL PENELITIAN	Nama Pembuat	Tahun Publik	Metode	Hasil Penelitian
1.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI MODAL BELANJA DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI	Ni Luh Putu Dita Silviani, I Made Pradana Adiputra	2023	Kuantitatif	Kenaikan pendapatan daerah mampu mengoptimalkan penanaman modal otoritas daerah. Bagaimana dana perimbangan dan PAD mempengaruhi alokasi belanja modal akan semakin kuat apabila didukung dengan adanya Budget Ratcheting.
2.	ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA DAERAH DI KOTA MAKASSAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH	Imran Tajuddin	2024	Kuantitatif	Ekspansi ekonomi dan pengeluaran pemerintah area memiliki dampak positif dan penting terkait penerimaan Daerah dikota Makassar dari periode 2012 hingga 2021. Berakibat menjadi dasar yang krisis untuk menaikkan pemasukan daerah serta pertumbuhan ekonomi.
3.	DETERMINAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	Amin Insani, Sri Rahayu, Misni Erwati	2023	Kuantitatif	Menurut penelitian ini, bahkan dengan investasi modal, pembangunan ekonomi, dan hasil audit diabaikan, peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan keuntungan pemerintah daerah. Namun, saldo dana menunjukkan kinerja keuangan yang buruk. Pemerintah daerah yang sangat bergantung pada pendanaan federal cenderung memiliki kinerja keuangan yang rendah.

4.	EFEK PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Fauzi Fauzi	2021	Kuantitatif	PAD & dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran investasi daerah di Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2010 hingga 2017.
5.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), SERTA BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA BARAT	Nareswari, Listya Nindita Sri Rahayu	2018	Kuantitatif	Secara silmutan, penerimaan lokal, penyaluran dana umum, dan pengeluaran asset berpengaruh kemandirian finansial kualitas suatu daerah tercermin dari sejauh mana lokasi tersebut mengandalkan Pendapatan Asli Daerah. Ada korelasi negative antara Tingkat kemandirian keuangan daerah dan PAD yang semakin tinggi.
6.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT	Yulianti Leki, Amran T. Naukoko, Jacline I. Sumual	2018	Kuantitatif	Studi sebelumnya membuktikan pemasukan PAD Kabupaten Halmahera Barat menyebabkan pengaruh menonjol dan menguntungkan evaluasi keuangan meskipun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.

7.	PENGARUH MODAL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI PAPUA	BELANJA TERHADAP ASLI (PAD)	Agus Sunaryo	2023	Kuantitatif	Kinerja keuangan mengindikasikan Mengacu pada uji t, Belanja modal berkontribusi positif Meskipun tidak menguntungkan secara signifikan terhadap PAD Provinsi Papua. Meskipun pengandaan modal berdampak baik, dampaknya terhadap peningkatan PAD Provinsi Papua tidaklah signifikan.
8.	PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, PENDAPATAN DAERAH, ALOKASI BELANJA MODAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	GOOD ASLI DANA UMUM, DI	Allen Pranata Putra, Adam Rio Fandi	2021	Kuantitatif	Hasil menunjukkan bahwa <i>Good Corporate Governance</i> , Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berperan dalam memberikan kontribusi yang menguntungkan, sementara belanja modal dan Kesejahteraan Masyarakat tidak memiliki dampak.
9.	PENGARUH KEUANGAN TERHADAP MODAL KABUPATEN/ PROVINSI SELATAN	KINERJA DAERAH BELANJA PADA KOTA DI SUMATERA	Nurhasanah, Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila	2022	Kuantitatif	Kinerja keuangan otoritas, yang mencakup pertumbuhan, desentralisasi, efisiensi, Efektivitas penerimaan asli daerah (PAD) dan tingkat ketergantungan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran untuk investasi di Provinsi Sumatera Selatan.
10.	DETERMINAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	KINERJA DAERAH	Amin Insani, Sri Rahayu, Misni Erwati	2023	Kuantitatif	Riset ini mengungkapkan jika penerimaan murni pengaruh daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sangat mencolok, seperti yang didukung oleh bukti empiris

Menurut Dessy Ari Permatasari dan Sri Trisnaningsih (2022), penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah, efektivitas dalam mengumpulkan PAD, dan pengelolaan belanja yang baik semuanya berkontribusi berpengaruh baik peningkatan kondisi keuangan daerah. Menurut Ni Putu Septiyani Putri dan Gede Adi Yuniarta (2023), riset ini mengindikasikan bahwa peningkatan PAD berdampak baik dan penting mempengaruhi kondisi keuangan pemerintah daerah Provinsi Bali selama 2017-2021. Sementara itu, pendapatan antar pemerintah dan kinerja keuangan tidak terpengaruh oleh belanja modal selama periode yang sama. Dan menurut Muntu Abdullah, Ika Maya Sari dan Yuliana Amelia (2022), riset ini mengungkapkan bila belanja modal adalah *factors* berdampak besar bagi kinerja keuangan pemerintah wilayah Kota Kendari. Meskipun kontribusinya relative kecil (7,07%), hasil ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran belanja modal untuk meningkat hasil finansial. Pengeluaran untuk modal sangat berdampak pada performa keuangan pemerintah daerah. Sebab beberapa alasan, ketika mereka melakukan ekspansi dipengaruhi oleh belanja modal. Salah satunya adalah fakta bahwa setiap kegiatan belanja modal memiliki potensi untuk menghasilkan sumber keuangan bagi daerah secara langsung. Efektivitas setiap aktivitas pengeluaran modal juga dinilai berdasarkan perkembangan pemasukan daerah, serta kualitas, kuantitas, dan waktu yang tepat untuk dilaksanakan. Menurut Neilis Sa'adah dan Abdul Rohman (2019) berpendapat anggaran belanja modal sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan mendorong korupsi, rendahnya kinerja karyawan memengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan daerah.

Tabel 2

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	JURNAL PENELITIAN	Nama Pembuat	Tahun Publikasi	Metode	Hasil Penelitian
1.	PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG	Citra Etika, Rachmania, Meti Elisa Pitri	2022	Kuantitatif	Investasi modal diwilayah lampung memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pendapatan asli daerah berdampak negatif pada kemajuan ekonomi.
2.	ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL	Dedy Arifuddin Setiawan, Harsono	2020	Kantitatif	Ekspansi keuangan diukur menggunakan produk produk domestik regional bruto (PDRB) menunjukkan total

	TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PAMEKASAN				keuntungan ekstra tercipta secara keseluruhan, Upaya di kawasan tersebut. Penelitian ini mengkaji hubungan antara variabel-variabel fiskal utama daerah dan pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten.
3.	PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEMISKINAN DI JAWA TENGAH DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI INTERVENING	Ardella Wahyu Luthvia, Triyono, Noer Sasongko	2023	Kuantitatif	Perluasan ekonomi tidak berdampak pada kemiskinan, tanpa perantara, perbandingan independensi dana wilayah berdampak pada kemiskinan tetapi presentase efektivitas daerah dan PAD tidak signifikan atas kemiskinan di Jawa Tengah.
4.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA MODAL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Deby Anggun Sari, SE., ME	2024	Kuantitatif	Antara tahun 2004 dan 2017, PAD dan DAU mempengaruhi upah modal Kabupaten Tanjung Jabung secara positif dan signifikan. Selain itu, PAD, DAU, dan Modal Barangay mempengaruhi pertumbuhan ekonomi provinsi tersebut pada periode yang sama.
5.	PENGARUH PAD, DAU, DAK, DBH, DAN BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL	Rendy Alvaro	2022	Kuantitatif	Hasil menunjukkan pendapatan daerah, dana transfer, dana transfer khusus, belanja operasional, serta anggaran pendidikan wilayah berdampak signifikan yang besar di perekonomian yang berkembang, disisi lain belanja modal berpengaruh merugikan.

6.	PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING	Muh. Resa Saputra, Haliah, Aini Indrijawati	2021	Kuantitatif	Belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, berarti bahwa laju pertumbuhan ekonomi daerah bergantung pada jumlah dana modal yang disediakan untuk pembangunan. Ada hubungan antara PAD sebagai perantara serta pengaruh pengeluaran dana pada peningkatan perekonomian wilayah.
7.	PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI	Fauzan Yudo Wicaksono	2022	Kuantitatif	Pengeluaran dana serta peningkatan ekonomi di wilayah Prov. Bali antara tahun 2016 hingga 2020 tidak memiliki dampak langsung. Sementara itu, belanja daerah dan pengembangan punya akibat negative pada tingkat kemiskinan di wilayah tersebut pada periode yang sama.
8.	ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI MANAJEMEN SERTA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	Alferd Donald Pasa Bessy, Pompong B Setiadi	2023	Kuantitatif	Hasil penelitian ini berfokus pada pengaruh faktor-faktor seperti efisiensi manajemen, kemandirian keuangan wilayah, dan fungsi uang dalam ekonomi. Temuan utamanya adalah bahwa peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan kemandirian finansial memiliki efek yang berarti pada pengembangan ekonomi, sedangkan pengeluaran dana tak berpengaruh.

9.	PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK, TENAGA KERJA, INVESTASI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SUMATERA UTARA	Darwin Damanik, Pawer Darasa Panjaitan, Sandri Saputra Siallagan	2023	Kuantitatif	Riset ini mengungkapkan jika peningkatan penduduk memiliki efek signifikan juga patut dicatat dipertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara, sementara variabel tenaga kerja, investasi, dan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
----	---	---	------	-------------	--

Menurut Sri Cahyaning (2018) penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan alokasi dana dari otoritas pusat menyebabkan dampak positif terhadap pengeluaran untuk investasi pemerintah daerah di Jawa Timur, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak. Hubungan keuangan diatur oleh pertumbuhan ekonomi bagi hasil dan belanja modal tidak mengubah atau memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan hasil yang tidak menguntungkan, dan investasi modal tidak memiliki korelasi dengan pertumbuhan ekonomi (Mutmainah, 2020). Sedangkan menurut Dewi Chrisanty Paat (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdampak buruk pada kemajuan ekonomi, meskipun tidak berpengaruh.

Tabel 3
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Modal

No.	JURNAL PENELITIAN	Nama Pembuat	Tahun Publikasi	Metode	Hasil Penelitian
1.	PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA SE- INDONESIA TAHUN 2018- 2021)	Muhammad Puji Prawiroyudo, Saring Suhendro	2023	Kuantitatif	Pendapatan asli daerah, dana hibah secara spesifik positif mempengaruhi belanja modal namun, pertumbuhan ekonomi tetap meningkat tidak berkorelasi positif dengan belanja modal.

2.	PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2011-2020	Cindy Elik Fajriati, Engkus, Husen Saeful Anwar	2023	Kuantitatif	Kinerja keuangan daerah, yang dinilai oleh seberapa efisiensi pendapatan daerah dibandingkan dengan pengeluaran daerah, mempengaruhi distribusi pada pembagian belanja modal di Provinsi DKI Jakarta secara signifikan.
3.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2017-2020	Abellisa Aulia Devi, Achmad Tjahjono	2023	Kuantitatif	Belanja Modal dipengaruhi secara signifikan oleh PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Secara keseluruhan, PAD, DAU, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.
4.	PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR	Widya Yektining Darmastuti, Endah Susilowati, Oryza Tannar	2022	Kuantitatif	Persentase efisiensi moneter dan proporsi independensi daerah mempengaruhi alokasi belanja modal secara parsial, menurut hasil analisis regresi linier berganda. Di sisi lain, rasio efisiensi PAD tidak mempengaruhi cara belanja modal dialokasikan.
5.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN SISA LEBIH PEMBIYAAAN	Farhan Fahrezi, Nuramalia Hasanah, I	2021	Kuantitatif	Pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan surplus pembiayaan sisa

	ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL	Gusti Ketut Agung Ulupui			anggaran tersisa dengan cara yang menguntungkan dan penting memengaruhi belanja modal (BM).
6.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR TAHUN 2013-2021)	M Saiful Hadi, 2023 Dheni Indra Kusuma		Kuantitatif	Dengan menggunakan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderating, penelitian investasi modal di Kabupaten Karanganyar menemukan bahwa dampak PAD terhadap belanja modal tidak signifikan, dana perimbangan pengaruh dukungan terhadap investasi dalam infrastruktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi memoderasi hubungan antara dana alokasi & pengeluaran modal.
7.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA KARANGANYAR TAHUN 2013-2021)	M Saiful Hadi, 2023 Dheni Indra Kusuma		Kuantitatif	Dengan menggunakan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderat, studi belanja modal di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa: 1. Dampak PAD terhadap belanja modal tidak menguntungkan; 2. Dana Perimbangan mempengaruhi belanja modal secara positif; 3. Ekonomi tidak dapat memoderasi belanja modal pay-as-you-drive;

						dan 4. Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi Dana Perimbangan bagi kebutuhan investasi.
8.	PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR	Widya Yektining Darmastuti, Endah Susilowati, Oryza Tannar	2022	Kuantitatif	Studi regresi linier berganda menunjukkan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi penetapan anggaran untuk pembelian asset/ investasi adalah indikator efisiensi keuangan dan rasio kemandirian daerah. Namun, rasio efektivitas Pad tidak memiliki dampak pada alokasi belanja modal secara signifikan.	
9.	PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BUDGET RATCHETING TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Bukti Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh)	Lilis Marlina	2019	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa alokasi dana dipengaruhi oleh kinerja keuangan regional berdasarkan pemusatan kekuasaan, keterikatan regional, otoritas finansial, dan kinerja penerimaan daerah.	
10.	PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH	Joni Kristian Firdi Yanto, Susi Astuti	2020	Kuantitatif	Studi ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi dan Tingkat penerimaan modal. Karena ini berdampak pada pertumbuhan harga saham modal, pemerintah daerah harus	

					terus meningkatkan Angkatan kerja keuangan dan peningkatan ekonomi.
11.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UMUM DANA ALOKASI DAN DANA BAGI HASIL PADA ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING KABUPATEN/ KOTA JAWA TIMUR PEMERINTAH 2013-2015.	Sri Cahyaning	2018	Kuantitatif	Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa di sejumlah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memengaruhi terhadap belanja modal, sementara dana bagi hasil tidak berdampak pengaruh terhadap belanja modal.
12.	EFEK PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI DI KABUPATEN KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010 S/D 2017	Fauzi Fauzi	2021	Kuantitatif	Temuan uji sisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya memoderasi dampak dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta sumber pendapatan daerah lainnya yang sah beserta sisa lebih pembiayaan anggaran, terhadap penyaluran belanja modal di kabupaten dan kota di seluruh provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2010 hingga 2017, dengan pertumbuhan ekonomi sebagai factor pengendali serta pendapatan daerah lain yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal dan

					pendapatan daerah lainnya yang berkaitan atas dasar penetapan belanja modal.
13.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI BALI)	Ni Luh Putu 2023 Dita Silviani, I Made Pradana Adiputra	Kuantitatif		Pemasukan local dan penyaluran dana dari pemerintah pusat mengandung dampak efek positif yang substansial terhadap distribusi belanja modal, seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian. Setelah itu, ratcheting anggaran, yang bersifat moderat, meningkatkan dampak PAD untuk membagikan belanja modal dan menyediakan dana untuk melawannya.

Menurut Mubarak Husni (2022) efektivitas Realisasi PAD menurun, sementara realisasi pengeluaran daerah meningkat. Kontribusinya sekadar mengalami sedikit perubahan antara kurun waktu 2017 dan 2018. Mengingat kedudukan efikasi PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bengkalis berbeda-beda. Kinerja PAD tidak berkorelasi langsung dengan kinerja belanja daerah seperti yang tergambar pada tahun 2017–2019.

Table 4
Pendapatan Daerah Terhadap Kemandirian

No.	JURNAL PENELITIAN	Nama Pembuat	Tahun Publikasi	Metode	Hasil Penelitian
1.	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD), DANA ALOKASI UMUM(DAU), SERTA BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH	Nareswari Listya Nindita, Sri Rahayu	2018	Kuantitatif	Penerimaan daerah awal, alokasi dana umum, dan biaya modal ditunjukkan dalam analisis ini memengaruhi secara serentak terhadap tingkat ototnomi daerah keuangan pemerintah daerah.

KABUPATEN/KOTA					
PROVINSI JAWA					
BARAT					
2.	PENGARUH KEMANDIRIAN, EFEKTIFITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH	Dessy Ari Permatasari, Sri Trisnaningsih	2022	Kuantitatif	Hasil menunjukkan hubungan antara rasio kemandirian daerah dan kinerja keuangan, menunjukkan bahwa indeks otonomi daerah mempengaruhi keberhasilan keuangan suatu daerah, menunjukkan seberapa besar keterlibatan penduduk dalam mengganti pajak dan retribusi daerah, yang merupakan konstituen utama..

Secara alami, ada banyak variabel yang mempengaruhi kemandirian daerah. Variabel keuangan, kesejahteraan, dan lingkungan adalah beberapa yang paling signifikan, dan hubungan antara variabel ini berdampak pada kemandirian daerah, dengan manfaat positif terhadap hasil keuangan daerah.

Tabel 1.5
Topik Penelitian

Topik Penelitian	Jumlah	Presentase
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19	38%
Pendapatan Asli Daerah Terhadap Daerah Kinerja Keuangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi	14	28%
Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal	13	26%
Pendapatan Daerah Terhadap Kemandirian	4	8%
Total	50	100%

Hasil analisis pada temuan topik penelitian, “Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” berjumlah 26 artikel dan “Pendapatan Asli Daerah Terhadap Daerah Kinerja Keuangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi” berjumlah 27 artikel.

Table 6
Tahun Terbit

Tahun	Jumlah
2018	4

2019	8
2020	5
2021	6
2022	10
2023	15
2024	2
Total	50

Hasil analisis pada temuan Tahun terbit, tahun 2018 berjumlah 4, tahun 2019 berjumlah 8, tahun 2020 berjumlah 5, tahun 2021 berjumlah 6, tahun 2022 berjumlah 10, tahun 2023 berjumlah 15 dan tahun 2024 berjumlah 2 sehingga didapat 50 artikel yang dijelaskan pada tabel 1.4

KESIMPULAN

Studi ini mengusut implikasi pembelian modal dan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan level keterlibatan personel pemerintah Indonesia. Studi ini menemukan bahwa manfaat daerah yang belum berkembang berpengaruh positif dan signifikan terhadap operasi otoritas wilayah. Itu menyatakan yakni jika daerah mendapatkan lebih banyak devisa, mereka dapat menjadi lebih kuat. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemekaran wilayah. Terlambah lagi, *capital expenditure* menguntungkan hasil mata uang pemerintah daerah. Akibatnya, struktur pembangunan daerah dapat diperkuat dengan peningkatan modal share. Ini juga berpotensi mengembangkan tingkat pergerakan ekonomi dilokasi yang dimaksud.

REFERENSI

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Aulia Devi, A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (Pad), dana alokasi umum (Dau), dana alokasi khusus (Dak), dan dana bagi hasil (Dbh) terhadap belanja modal pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 1104–1126. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i3.778>
- Aulia, R. R. (2020). Pengaruh kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh. *Volume(5)(4)*, 584–598.
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Volume(3)(5)*.

- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i1.1913>
- Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah pada 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. *JKA: Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2).
- Handayani, T. U. E. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. *Volume(2)(1)*, 2348–2361.
- Husni, M. (2022). Analisis pendapatan asli daerah (Pad) terhadap belanja daerah studi kasus pada kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019. *April*.
- Lastri, S., & Fatma, S. H. (2021). Peran mediasi belanja modal dalam hubungan pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. *Volume(11)(3)*.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mahadewi, M. A. M., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). Pengaruh pengukuran pemerintah daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di provinsi Bali. *April*, 107–116.
- MARLINA, L. (2019). Pengaruh kinerja keuangan daerah dan budget ratcheting terhadap alokasi belanja modal (bukti empiris pada kabupaten/kota di provinsi Aceh). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 34–44. <https://doi.org/10.35308/akbis.v2i2.931>
- Neilis, S., & Rohman, A. (2019). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2016-2020. *Volume(1)(1)*, 64–78.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh pajak daerah, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Dana keistimewaan dan belanja modal terhadap (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2018). *Volume(28)(1)*, 89–105.

- Prawiroyudo, M. P., & Suhendro, S. (2023). Fund and special allocation fund on capital expenditure budget allocation (empirical study on regency and city governments throughout Indonesia in 2018-2021) pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khus. *Volume*, 9934–9946.
- Sari, B. I. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. *Volume*(3)(1), 56–60. <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. *Volume*(2)(3).
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi kasus di kabupaten Tegal periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>